



## Kebijakan Pimpinan dalam Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Lulusan

Della Utari<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [dellautari544@gmail.com](mailto:dellautari544@gmail.com)

\* Correspondence Author

### Article History:

Received : August 02, 2023

Revised : August 24, 2023

Accepted : October 13, 2023

Online : November 19, 2023

### Keywords:

Islamic Boarding School  
Educational policy  
Educational infrastructure  
National Education Standards  
Quality of graduates

### DOI:

<https://doi.org/10.56436/mijose.v2i1.243>

### Copyright:

© The Authors

### Lisencing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### Abstract

This article aims to analyze the process and policy determination of Islamic boarding school leaders in improving the infrastructure and quality of graduates at the Al-Munawaroh Islamic Boarding School, Bangko District, Merangin Regency. The problem that is the focus of the discussion is how do Islamic boarding school leaders implement institutional policies to improve facilities and infrastructure to increase Islamic boarding school graduates? This article comes from qualitative research using data collection through observation, interviews, documentation and triangulation. Research findings show that leadership policies in improving Islamic boarding school facilities and infrastructure are carried out in stages; planning, procurement, maintenance and inventory. Achieving the quality of graduates is carried out by implementing 8 National Education Standards. Meanwhile, the realization of Islamic boarding school policies to achieve quality graduates is carried out by carrying out open communication, both formally and informally.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis proses dan penetapan kebijakan pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan sarana prasarana dan mutu lulusan di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Permasalahan yang menjadi fokus bahasan adalah bagaimana pimpinan pesantren melaksanakan kebijakan lembaga untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan lulusan pesantren? Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan dalam peningkatan sarana dan prasarana pesantren dilakukan dengan tahapan; perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi. Pencapaian mutu lulusan dilakukan dengan menerapkan 8 Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan realisasi kebijakan peantren untuk mencapai mutu lulusan dijalankan dengan melakukan komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.

### A. Pendahuluan

Hakikatnya pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan generasi yang lebih mandiri agar mampu bertahan hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri dalam kehidupannya. Tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan manusia yang memiliki keimanan, akhlakul karimah dan ketakwaan serta aktif membangun kerukunan dalam berkehidupan sehari-hari serta dapat menjunjung tinggi nilai peradaban bangsa.

Dengan seperti itu, manusia akan tangguh dan sabar dalam menghadapi masalah, serta perubahan zaman yang akan datang.

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara membimbing, mengajar, dan melatih seseorang di lingkungan sekolah secara langsung agar mereka dapat mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang secara mandiri.<sup>1</sup> Pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan multidimensial karena jika diterpa oleh perubahan zaman maka akan bertahan.<sup>2</sup> Pendidikan di pesantren merupakan sebuah pendidikan untuk mempersatukan ilmu agama serta ilmu umum yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia yang memiliki wawasan yang luas serta karakter seorang yang baik. Di Indonesia pesantren menjadi sebuah badan pendidikan yang tua dengan memiliki fungsi untuk central dakwah serta meningkatkan ilmu masyarakat untuk belajar agama. Di pesantren para santri berinteraksi dengan kiyai atau ustad. Mereka belajar ilmu agama di masjid seperti membahas buku-buku tentang agama, kitab kuning dan lainnya.

Unsur terpenting di pesantren diantaranya yaitu kiyai, santri/santriwati, masjid, pondok, asrama, kitab-kitab, serta buku-buku tentang agama. Pesantren sudah ada sebelum masa kemerdekaan karena merupakan system pendidikan di nusantara khususnya di pusat kerajaan islam. Meskipun menggunakan nama yang berbeda salah satunya yaitu meunasah di Aceh surau di Minangkabau dan pesantren di Jawa. Untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan suatu pendidikan maka diperlukan adanya pengawasan atau supervise dari para pemimpin pendidikan baik itu kepala sekolah maupun tingkatan lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab [33] Ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Q.S. Al- Ahzab [33:21]).<sup>3</sup>*

Berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S Al-Ahzab dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan menjadi suri tauladan yang baik untuk pemimpin yang berkualitas. Kebijakan ialah ketetapan yang diambil oleh pemimpin yang berkaitan dengan aturan yang berlaku untuk tujuan bersama. Kebijakan ini merupakan suatu ketetapan dari pemimpin terhadap organisasinya dengan mengecualikan aturan yang berlaku jika kelompok tersebut tidak bisa memenuhi aturan tersebut. Artinya pemimpin membuat kebijakan agar tujuan dapat tercapai.<sup>4</sup> Oleh karena itu, kebijakan yang harus dilakukan adalah menentukan cara tepat dari seorang pemimpin pesantren, karena menjadi seorang pemimpin harus memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas agar metode tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Oleh sebabnya pimpinan pesantren atau kiyai sangat berperan penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana demi memajukan kualitas dan mutu lulusan di pondok pesantren tersebut. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Negara Standar Pendidikan menegaskan

<sup>1</sup> Binti Maunah, *Landasan pendidikan* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 5.

<sup>2</sup> Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Perdana Media Group, 2018), 11.

<sup>3</sup> QS.Al-Ahzab/ 33: 21.

<sup>4</sup> "Bunga Wati, Kebijakan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Wustu (MSW) Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu," *Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan* 3, no 1, (2018): 10, <http://dx.doi.org/10.29300/nz.v3ti1.1856>.

bahwa standard pendidikan nasional merupakan kriteria minimum pada tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standard isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standard penilaian pendidikan.<sup>5</sup> Mutu lulusan sangat erat kaitannya dengan hasil yang baik dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilannya.

Mutu lulusan merupakan bagian penting dalam membentuk sasaran dari insitusi pendidikan untuk terwujudnya tujuan pendidikan. Mutu dapat diartikan menjadi nilai produk, pelayanan ataupun suatu yang cocok dengan standard yang telah diresmikan, dengan demikian perilaku tersebut jadi terlihat lebih utama dari yang lain. Edward Sallis dalam bukunya menerangkan jika mutu merupakan suatu yang berkaitan dengan gairah serta harga diri seorang, dia pula menerangkan jika mutu dalam dunia pembelajaran ialah suatu yang bisa dibedakan antara yang baik serta yang kurang baik, yang berhasil serta yang kandas. Sehingga disini mutu ialah suatu hal yang paling berarti dan wajib terus dikembangkan dalam setiap lembaga pendidikan. Pembelajaran yang bermutu merupakan pembelajaran yang dapat menciptakan lulusan yang mempunyai keahlian, pengetahuan serta keahlian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mutu pembelajaran wajib diusahakan dalam menggapai kemajuan yang dilandasi dengan pergantian terencana. Standar kompetensi lulusan ialah standar minumim yang wajib digapai oleh tiap siswa ketika tahapan belajar mengajar sepanjang disekolahnya.

Intutusi pendidikan wajib melaksanakan pengontrolan serta merencanakan mutu pendidikan agar di setiap tahapannya bisa dilakukan dengan baik dan benar. Mutu yang baik hendaknya diraih serta didapatkan jika sudah melaksanakan tahapan yang baik, bila tahapan insritusi pembelajaran baik, hingga secara otomatis akan mendapatkan hasil lulusan yang baik, serta secara otomatis pula mutu lulusan akan meningkat. Kesuksesan suatu lembaga pendidikan dalam memajukan prestasi peserta didiknya dapat dilihat dari mutu lulusannya, Kontribusi manajemen sangat substansial untuk menetapkan mutu lembaga pendidikan, yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengawas, evaluasi dan perberdayaan yang ada.

Pondok Pesantren Al-Munawaroh merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berada di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, pondok pesantren ini memiliki 3 jenjang pendidikan SD IT, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. untuk SD IT pondok pesantren menerapkan sistem pembelajaran *Full Day* untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madararah Aliyah ini sistem mondok yang mana santri dan santriwatinya itu tinggal atau menetap di asrama yang disediakan. Pondok Pesantren Al-Munawaroh memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan memperoleh akreditasi A (Unggul), akan tetapi pondok pesantren terus melakukan perkembangan dan pembenahan dari berbagai aspek, salah satunya peningkatan sarana prasarana dan Mutu Lulusan. Berdasarkan pengamatan awal (*grandtour*), kebijakan pimpinan pondok pesantren dalam peningkatan sarana prasarana dan mutu lulusan, ini dapat dilihat dari:

1. Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terus menerus dilakukan.
2. Kebijakan pimpinan dalam mewujudkan kompetensi akademik peserta didik untuk menghasilkan Mutu Lulusan sudah optimal.
3. Banyaknya lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan dan perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>5</sup> "Jamilah, Nurcahaya, Nadia, Nank Purwiyanti, Vivi Yumarni, Liziatul Maula, dan Nurhikmah, "The Effect Of Learning Cimate And Self-Concept On Kindergartens Independence: An Experimental Study," *Jurnal Critical Reviews* no 9 (2020): 628, <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.09.124>.

Namun, evaluasi harus terus dilakukan terhadap sarana prasarana dan mutu lulusan, hal ini dapat dilihat diantaranya:

1. Pengelolaan dana bantuan baik itu dari Badan Operasional Madrasah (BOM), yayasan, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), Iuran pembangunan dan donatur yang tidak terikat belum terealisasi dengan baik.
2. Pembangunan yang masih mangkrak.
3. Transisi kurikulum yang menyebabkan peserta didik beradaptasi dengan lambat sehingga mempengaruhi prestasi peserta didik.

Dikarenakan sarana prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Ditemukan beberapa kesenjangan dan kendala, sarana yang masih kurang dan prasarana yang terus dibangun namun belum kunjung selesai contoh nya kurang nya kursi, papan tulis dan meja, kasur di asrama yang kurang serta lemari yang sudah banyak rusak baik itu lemari kelas maupun lemari di asrama dan pembangunan asrama, pembangun kelas dan perbaikan masjid yang membuat santri dan santriwati harus berhati-hati.

Berdasarkan deskripsi tersebut, diperlukan upaya kebijakan dari pimpinan pondok pesantren untuk meningkatkan sarana prasarana dan mutu lulusan pesantren dengan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana demi menghasilkan mutu lulusan terbaik.

## B. Kerangka Teori

### 1. Kebijakan Pimpinan

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.<sup>6</sup>

Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.<sup>7</sup> Sedangkan kebijaksanaan (*policy*) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikuti oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan menurut Gamage dan Pang menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.<sup>8</sup> Kepemimpinan berasal dari kata "pimpin" yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan.<sup>9</sup> Kepemimpinan dapat pula di definisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Stephen P. Robbins "Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan".<sup>11</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun (pemberi contoh) atau penunjuk jalan. Jadi secara fisik pemimpin itu berada didepan. Tetapi pada hakikatnya, dimanapun tempatnya, seseorang dapat menjadi pemimpin dalam memberikan

<sup>6</sup> Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2008), 97

<sup>7</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 16.

<sup>8</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*, 17.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), 684

<sup>10</sup> Rivai, *Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003), 3

<sup>11</sup> Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior* (Prentice-Hall, 1983), 112

pimpinan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Kihajar Dewantoro yang terkenal “ing ngarso sung tuloda, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” artinya, jika ada didedapan memberikan contoh, di tengah-tengah memberikan dorongan/motivasi, sedangkan apabila berada dibelakang dapat memberikan pengaruh yang menentukan. Dalam bahasa Inggris, istilah kepemimpinan disebut dengan *leadership*.

## 2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Fuad yang dikutip oleh sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya.<sup>12</sup> Sarana adalah sebuah perangkatan peralatan, bahan, perabot yang secara langsung digunakan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas. Sarana menjadi sebuah kelengkapan keperluan dalam menjalankan sebuah kegiatan atau aktivitas.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dimengerti bahwa sarana dan prasarana belajar adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Bafadhol menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana berikut :

- a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah/ madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien.
- b. Untuk mengupayakan sarana dan prasarana secara tepat dan efisien.
- c. Untuk mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaannya akan selalu dalam kondisi siap pakai ketika akan digunakan.<sup>14</sup>

ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pelaksana organisasi, dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan/ sekolah, diantaranya

- a. Prinsip pencapaian tujuan
- b. Prinsip efisiensi
- c. Prinsip kejelasan tanggung jawab
- d. Prinsip kekohesifan

Standar sarana serta prasarana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 dinyatakan menyatakan bahwa: standarisasi sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA memiliki kriteria minimum sarana serta kriteria minimum prasarana. Standar sarana serta prasarana tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria minimum sarana diantaranya peralatan pendidikan, media pendidikan, perabot, teknologi informasi dan komunikasi, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang harus dimiliki setiap sekolah/madrasah.
- b. Kriteria minimum sarana prasarana yaitu bangunan, lahan, jasa dan ruang-ruang instalasi daya yang harus dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

<sup>12</sup> “Ike Malaya Sinta Manajemen Sarana dan Prasarana” *Jurnal Islamic Education Manajemen* no. 1 (2019) : 79 <http://doi.org/10.32678/v1i02>.

<sup>13</sup> “Saniatu Nisail Jannah & Uep Tatang Sontani, Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sebagai Faktor Determinan terhadap Motivasi Belajar Siswa” *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 3 no. 1, (2018) : 63-70 <http://ejournal.sitta.ac.id/index.php/attahsin/index>.

<sup>14</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 116.

### 3. Mutu Lulusan

Secara tradisional, mutu dipandang sebagai ekspresi keunggulan suatu produk, artinya produk tersebut dapat bekerja lebih baik, atau bertahan lebih lama, atau hanya terlihat lebih bagus.<sup>15</sup> Mutu juga sering kali didefinisikan sebagai sejauh mana hasil dari suatu produk atau jasa memenuhi kepuasan pelanggan. Namun demikian di bidang pendidikan mutu tidak hanya sekedar memenuhi harapan pelanggan. Lebih dari pada itu, mutu pendidikan pada hakikatnya terkait dengan orientasi akademik suatu lembaga pendidikan. Manajemen peningkatan mutu lulusan adalah perencanaan yang meliputi 8 (delapan) standar nasional pendidikan yaitu : perencanaan standar isi, perencanaan standar proses, perencanaan standar lulusan, perencanaan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, perencanaan standar sarana dan prasarana, perencanaan standar pengelolaan, perencanaan standar pembiayaan pendidikan dan perencanaan standar penilaian pendidikan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini, Penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode Penelitian naturalistik karena Penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penentuan subjek dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Analisa data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Uji keterpercayaan data dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan konsultasi pembimbing.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Proses Pimpinan Dalam Peningkatan Sarana Prasarana Di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Merangin

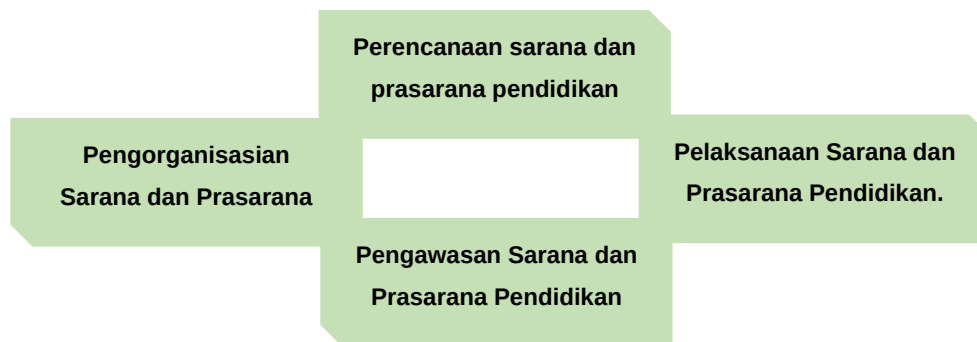
Di dalam sebuah lembaga pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Sarana dan prasarana sangat berperan penting terhadap keberlangsungan berjalannya pendidikan. Dengan adanya sarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga pondok pesantren, maka proses kegiatan belajar mengajar di dalam lembaga pondok pesantren tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena keberadaan sarana dan prasarana selain menunjang terlaksananya proses belajar mengajar, juga dapat membantu pondok pesantren dalam mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Bafadhol, menjelaskan bahwasannya sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan merupakan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Syarifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana pendidikan ialah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan ialah semua peralatan perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.<sup>16</sup> Adapun proses sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan yaitu:

Adapun proses sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan yaitu :

<sup>15</sup> Sharon T Mortimer and David Mortimer, *Quality and Risk Management in the IVF Laboratory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 24.

<sup>16</sup> Rusydi Ananda dan Kinata Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Medan: CV Widya Puspita, 2017), 20.



Gambar. Proses Sarana dan Prasarana

#### a. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan

Perencanaan merupakan proses pertama yang hendak dilakukan ketika melaksanakan suatu pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan dari pendidikan.<sup>17</sup> Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi distribusi, dan pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. proses ini hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di pondok pesantren seperti pimpinan, kepala madrasah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, dan bendahara serta komite pondok pesantren.<sup>18</sup> Nanang Fattah, perencanaan adalah penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif mungkin.<sup>19</sup> Dalam hal ini, perencanaan di dalam sarana dan prasarana meliputi 3 hal, yaitu :

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlakukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan (kebutuhan primer) dan kebutuhan yang menunjang. Maka dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan membutuhkan kegiatan analisis kebutuhan. Kebutuhan di dalam sarana dan prasarana pondok pesantren bersifat dinamis bukan statis. Oleh sebab itu kebutuhan sarana dan prasarana bisa berbeda dengan tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana pondok pesantren dilakukan bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan di pondok pesantren, wali murid, komite pondok pesantren, dan stakeholders lainnya.

Analisis kebutuhan dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan, seperti, mendata keperluan sarana dan prasarana pada menjelang tahun ajaran baru, mengidentifikasi, mendata sarana dan prasarana yang ada dan masih dalam kondisi baik, yang perlu diperbaiki karena rusak ringan dan yang perlu dihapus karena rusak berat. Pimpinan Pondok Pesantren juga harus memiliki proyeksi ke depan tentang kebutuhan sarana dan prasarana dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

<sup>17</sup> Ahmad Affan Zaini, *Urgensi Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Ummul Quro' 2016), 32.

<sup>18</sup> Barnawi, *Manajemen Sarana Dan Prasarana*, 51.

<sup>19</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 49.

Dalam proyeksi tersebut, pimpinan pondok pesantren harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sumber daya untuk pengadaannya.<sup>20</sup>

1) Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di pondok pesantren

Sarana dan prasarana, yang dimaksud dengan pengadaan sarana dan prasarana ialah suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana pondok pesantren pada masa yang akan datang. Dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pondok pesantren dianjurkan pondok pesantren membuat daftar cek, mengenai sarana dan prasarana yang sudah diadakan maupun sarana dan prasarana yang belum diadakan. Pengadaan sarana dan prasarana inilah yang pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh pondok pesantren sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh pondok pesantren dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran.<sup>21</sup>

2) Sumber anggaran/ dana.

Dalam sarana dan prasarana, yang dimaksud dengan fungsi perencanaan penganggaran dana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memutuskan rincian menurut standar yang berlaku, terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan, sehingga dalam perencanaan penganggaran dana dapat menghindari terjadinya pemborosan.<sup>22</sup>

b. Pengorganisasian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengorganisasian merupakan kegiatan pembagian tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah, karena tugas tersebut demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang, tugas ini di bagi dan dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi, kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip organisasi. Dalam hal ini pengorganisasian sarana dan prasarana, meliputi 2 hal yaitu :

1) Pendistribusian sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan suatu kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam proses dari kegiatan pendistribusian ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu ketepatan barang yang di sampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sasaran penyampaiannya, ketepatan kondisi barang yang di salurkan. Dalam rangka itu paling tidak 3 langkah yang sebaiknya di tempuh oleh bagian penanggung jawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu, penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, penyerahan barang.<sup>23</sup>

2) Penataan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan sumber yang utama, oleh karena itu dalam hal ini sarana dan prasarana memerlukan penataan sehingga fungsional, aman dan atraktif untuk keperluan proses pembelajaran disekolah. Secara fisik sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi yang higienik dan psikologis, sehingga dengan adanya kondisi tersebut dapat menimbulkan minat belajar. Hampir dari separuh waktu yang digunakan peserta didik, digunakan untuk belajar dan

---

<sup>20</sup> Ananda dan Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana*, 29-30.

<sup>21</sup> Kinata Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Medan: CV Widya Puspita, 2017), 29-30.

<sup>22</sup> Siti Zulaikho, *Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2018), 28.

<sup>23</sup> Budi Mansur, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Jakarta: Cipta Buku, 2016), 25.



bermain di sekolah. Karena itu lingkungan di dalam madrasah (sarana dan prasarana) harus aman, sehat, dan menimbulkan persepsi yang positif bagi peserta didik di lembaga tersebut.<sup>24</sup>

c. Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Dalam menjalankan peranannya, penggerak merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian, sehingga orang lain mau mendukung dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan dari organisasi/ lembaga pendidikan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Fungsi penggerak berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Oleh karena hal tersebut, seorang pemimpin lembaga pendidikan dalam membina kerja sama, mengarahkan dan mendorong kegairahan kerja pada bawahannya perlu akan adanya pemahaman mengenai keadaan faktor-faktor manusia dan pelakunya.<sup>25</sup> Manajemen sarana dan prasarana pada kegiatan pelaksanaan meliputi 4 hal, yaitu :

1) Pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana pendidikan mempunyai tugas, yaitu mengatur dan menjaga sarana dan prasarana agar tetap selalu memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya pendidikan. Dalam kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana ini, meliputi beberapa kegiatan, diantaranya perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan serta penataan. Dalam pemanfaatan sarana dan prasarana ini hendaknya memperhatikan dua aspek yang penting, yaitu aspek efektifitas dan aspek efisien. Aspek efektifitas merupakan pemakaian sarana dan prasarana di pondok pesantren hanya ditunjukkan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran, serta memberi kesempatan pada orang tua peserta didik untuk mengunjungi pondok pesantren guna mengobservasi program pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan aspek efisien merupakan pemakaian sarana dan prasarana di madrasah harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Dengan berjalannya fungsi yang sebagaimana disebutkan diatas pemimpin di madrasah dapat memastikan percepatan pengembangan madrasah lebih baik. Jika ada salah satu fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka percepatan pengembangan madrasah akan mengalami hambatan dan akan berdampak kepada outcome dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah tersebut.<sup>26</sup>

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang berupa menjaga keberlangsungan dari fungsi sarana dan prasarana pendidikan agar dapat digunakan secara berulang dan selalu siap sedia ketika hendak dibutuhkan. Pemeliharaan perlengkapan pendidikan dijelaskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan terhadap sarana dan prasarana agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren perlu melalui tahap pengorganisasian, pembuatan program pemeliharaan, pelaksanaan atau pemeliharaan, dan pendataan bagi sarana dan prasarana yang telah dilakukan pemeliharaan, sekaligus juga mencatat kondisi barang yang dapat dirangkai dalam tahap inventarisasi dalam sarana dan prasarana pendidikan.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Daryanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 52-53.

<sup>25</sup> Irjus Indrawan, *Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah* (Yogyakarta: Deppublish, 2015), 5.

<sup>26</sup> Indrawan, *Manajemen Sarana dan Prasarana*, 8.

<sup>27</sup> Arisandi Fardiyono, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta\

### 3) Investasi sarana dan prasarana

Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang pertama kali kegiatan yang dilakukan adalah untuk pengendalian sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang/penerbit (buku), volume/jumlah barang, tanggal perolehan/pembelian barang, mutasi/perubahan, sumber dana dan keterangan barang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kompri yang bahwasanya, dalam kegiatan inventarisasi yang digunakan untuk mengendalikan sarana dan prasarana adalah dengan melakukan kegiatan pencatatan sarana dan prasarana dan melakukan pembuatan kode. Dengan melalui kegiatan pencatatan yang rinci terhadap sarana dan prasarana pendidikan, yang berguna akan memberikan kemudahan bagi penanggung jawab dalam mengendalikannya sarana dan prasarana sesuai dengan penggunaan dan perawatan barang-barang tersebut.

Penginventarisasian sarana dan prasarana pendidikan yang kedua adalah untuk melakukan kegiatan pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan tersebut, dilakukan dengan mengecek buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang didalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan. Hal tersebut didukung dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty intinya menyatakan bahwa setelah pencatatan dan pemberian kode pada setiap sarana dan prasarana yang diadakan memiliki tujuan agar semua pihak pondok pesantren mudah mengenal kembali perlengkapan di pondok pesantren baik ditinjau dari segi kepemilikan sampai pada penanggungjawab dan pengawasan. Pengawasan sarana dan prasarana sudah menjadi tanggung jawab pondok pesantren.<sup>28</sup>

#### d. Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan penentu terhadap apa yang harus dilakukan, sekalipun menilai dan memperbaiki, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan hendak dilaksanakan. pengawasan berorientasi pada objek yang dituju (pendidikan) dan merupakan alat untuk menyuruh bekerja untuk menuju sarana yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan seluruh upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional yang bertujuan untuk kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

### 2. Penetapan dan Realisasi Kebijakan Pimpinan Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Di Pondok Pesantren Al- Munawaroh Merangin

Konsep mutu lulusan sebagaimana ditegaskan Uwes adalah Gambaran dan karakteristik menyeluruh pendidikan yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. dengan kata lain, mutu pendidikan mencakup input, proses, dan output pendidikan. sementara input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, termasuk guru BP, Karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan) input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana,

rta, 2015), 43-44.

<sup>28</sup> Nasruddin dan Mulyadi, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 20.

<sup>29</sup> Indrawan, *Manajemen Sarana dan Prasarana*, 5.

program, dsb. input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.<sup>30</sup>

Mutu lulusan merupakan pilar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan handal, sehingga dengan demikian usaha-usaha peningkatannya harus selalu dilakukan secara terus menerus. Tetapi pada kenyataannya, usaha-usaha tersebut masih belum maksimal dan memuaskan. Salah satu faktor penyebabnya pencapaian mutu lulusan adalah kinerja pimpinan pondok pesantren. Mutu kinerja pimpinan pondok pesantren dapat diukur dari produktifitas kerja, sedangkan produktifitas kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, sikap, dan etika kerja, gizi dan kesehatan, jaminan social, tingkat penghasilan, iklim, dan lingkungan kerja, teknologi, sarana produksi dan kesempatan berprestasi. Fatimah, untuk menentukan kriteria lulusan disebuah sekolah, perlu adanya standarisasi yang merupakan suatu pengejawatahan dari paham *all can be measured* bahwa segala sesuatu yang dapat diukur. karena segala sesuatu dapat diukur, maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas lulusan yang telah di hasilkan. Dalam konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Beare sebagaimana yang dikutip oleh Fatimah memberikan petunjuk bahwa standar mutu lulusan dapat ditetapkan dengan<sup>31</sup>:

- a. Membandingkan dengan mutu yang telah lalu
- b. Menggunakan mutu dari organisasi lain
- c. Menetapkan mutu yang diinginkan
- d. Mutu menurut pertimbangan professiona
- e. Mutu yang direncanakan
- f. Mutu optimal

Untuk mengukur lulusan tersebut perlu adanya standarisasi yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional, standar yang digunakan untuk mengukur mutu lulusan dengan menggunakan parameter Ujian Madrasah (UM) Karena itu, pimpinan pondok pesantren perlu menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu lulusan di pondok pesantren yang dipimpinnya. Peningkatan mutu pondok pesantren yang bermuara pada upaya melahirkan lulusan yang bermutu memerlukan perubahan kultur organisasi, suatu perubahan yang mendasar tentang bagaimana individu-individu dan kelompok memahami peran dan pekerjaan mereka dalam organisasi dan kultur sekolah. karena itu, pimpinan pondok pesantren harus senantiasa memahami pondok pesantren sebagai suatu sistem organisasi.<sup>32</sup>

Standar Lulusan berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, ketemampilan, dan pengetahuan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan.

Pondok pesantren Al-Munawaroh melakukan ujian akhir ini di pondok pesantren sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama untuk mengetahui kesesuaian dan pencapaian standar kompetensi lulusan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. kesesuaian standar kompetensi

---

<sup>30</sup> Zakar, *Kepala Sekolah*, 118.

<sup>31</sup> Zakar, *Kepala Sekolah*, 122-123.

<sup>32</sup> Zakar, *Kepala Sekolah*, 126.

lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan kebutuhan peserta didik, baik local, nasional, maupun global. Sementara itu, pencapaian standar kompetensi lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala terhadap lulusan dari setiap satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian sumber daya dan proses pembelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu.

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menetapkan surat keputusan pendidikan islam nomor 455 Tahun 2022 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022. Pelaksanaan ujian madrasah untuk mengukur capaian kompetensi lulusan (SKL) pada akhir jenjang pendidikan. Ujian Madrasah meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas akhir pada satuan pendidikan baik kelompok mata pelajaran wajib maupun muatan lokal. UM diikuti seluruh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan pada madrasah ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagai salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah memberi wewenang penuh kepada satuan pendidikan dalam hal ini adalah madrasah untuk menyelenggarakan ujian bagi peserta didiknya.<sup>33</sup>

Untuk menghasilkan penerus bangsa yang membanggakan maka dari itu lembaga harus memiliki kerjasama yang baik antara lembaga lain masyarakat dan orang tua. serta pemebelajaran yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, peningkatan mutu lulusan meliputi input, proses dan output pendidikan karena sentral layanan adalah output secara umum dan lulusan secara umum, mutu lulusan itu sendiri sangat terkait dengan mutu input, proses, dan output. ketiganya tidak dapat dipisahkan dengan satu dengan yang lain.

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan berlangsung proses. sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses, diantaranya meliputi (1) siswa, berupa kesiapan dan motivasi belajarnya, (2) guru, berupa kemampuan profesional, moral kerjanya (kemampuan personal), dan kerjasamanya (kemampuan sosial), (3) kurikulum, berupa relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya, (4) sarana dan prasarana, berupa kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran, (5) masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan madrasah menengah atas), berupa partisipasinya dalam mengembangkan program-program pendidikan sekolah. mutu komponen komponen tersebut diatas menjadi focus perhatian sekolah.

Secara lebih rinci dapat disebutkan input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundangundangan, deskripsi tugas, rencana, program. input harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. kesiapan input sangat diperlukan agar proses berjalan dengan baik. oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input data diukur dari tingkat kesiapan input. makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.<sup>34</sup>

### 3. Realisasi Kebijakan Pimpinan Dalam Peningkatkan Mutu Lulusan Di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Merangin.

Syaiful Sagala, bahwa terdapat lima langkah formulasi strategi yang harus dilakukan, yaitu: 1) perumusan visi (mission determination) yaitu pencitraan bagaimana pondok pesantren seharusnya bereksistensi; 2) asesmen lingkungan eksternal (environmental external assessment)

<sup>33</sup> Pusat Oprasional Standar, *Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI:Prosedur Oprasional Standar Ujian Madrasah (UM)*, <https://simpuh.Kemenag.go.id>

<sup>34</sup> Khairul, *Strategis dalam Upaya Mutu Lulusan*, 212.

yaitu mengakomodasi kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah; 3) asesmen organisasi (organization assessment) yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber daya madrasah secara optimal; 4) perumusan tujuan khusus (objective setting) yaitu penjabaran dan pencapaian misi madrasah yang ditampakkan dalam tujuan madrasah dan tujuan tiap-tiap mata pelajaran; 5) penentuan strategi (strategi setting) yaitu memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana, maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk itu.<sup>35</sup>

Adapun realisasi kebijakan Pimpinan pondok pesantren Al-Munawaroh dalam keberhasilan Mutu lulusan peserta didik sudah menerapkan sesuai dengan visi, misi yang sudah ada di pondok pesantren. selain itu juga adanya kegiatan ekstrakurikuler itu mampu menambah wawasan santriwan dan santriwati yang tidak hanya mereka dapatkan dari akademik. Agar lulusan pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai harapan, maka di buat pendidikan terpadu. sistem pendidikan harus memperhatikan seuruh unsur pembentukan sistem yang unggul. ada tiga faktor, pertama, sinergi antar sekolah, masyarakat dan keluarga. Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Ketiga, berorientasi pada pembentukan tafaqah islam, berkepribadian islam dan penguasaan ilmu pengetahuan.<sup>36</sup>

Akdon mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi yaitu: (1) menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi, (2) mengenali lingkungan dimana organisasi berada, (3) melakukan analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi untuk mempertahankan eksistensi dan melaksanakan tujuannya.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dalam proses ini seorang pimpinan harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia agar dalam penyusunan strategi dengan matang dan tau betul akan konsekuensi dan hasil dari penyusunan seperti apa agar yang di hasilkan efektif dan efisien dan nantinya akan menghasilkan lulusan yang baik

## E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses kebijakan kepala sekolah dalam rangkai meningkatkan mutu lulusan adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang di buat kemudian melakukan pengorganisasi yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dan di imlementasikan yaitu menjalankan kebijakan yang di buat serta yang terahir adalah melakukan eveluasi yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program tahfizul Qur'an, program ekstrakurikuler agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Untuk mencapai mutu lulusan, Pondok Pesantren al-Munawaroh telah menerapkan 8 SNP delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, antra lain; Standar isi, standart kompetensi lulusan, standar pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

<sup>35</sup> Sagala, *Strategik Dalam Mutu Pendidikan*, 53

<sup>36</sup> Ridwan Abdullah Sani, Isda Pramuniati, Anies Mucktiany, *Penjamin Mutu Sekolah* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), 39.

<sup>37</sup> Akdon, *Strategi Manajement For Educational Manajement, Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 82.

3. Adapun realisasi kebijakan pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan di Pondok Pesantren Al-Munawaroh dijalankan dengan melakukan komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal melalui rapat kerja, *briefing*, rapat pimpinan, rapat Wali Kelas, rapat guru senior, rapat guru dan karyawan, rapat dinas, rapat bidang studi dalam rangkai meningkatkan mutu pendidikan.

### Daftar Pustaka

- Ananda, Rusydi dan Kinata Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* Medan: CV Widya Puspita, 2017.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Jamilah, Nurcahya, Nadia, Nank Purwiyanti, Vivi Yumarni, Liziatul Maula, dan Nurhikmah, "The Effect Of Learning Cimate And Self-Concept On Kindergartens Independence: An Experimental Study," *Jurnal Critical Reviews* no 9 (2020): 628, <http://dx.doi.org/10.31838/jcr>.
- Ike Malaya Sinta Manajemen Sarana dan Prasarana" *Jurnal Islamic Education Manajemen* no. 1 (2019) : 79 <http://doi.org/10.32678/v1i02>.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Jannah, Saniatu Nisail & Uep Tatang Sontani, Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sebagai Faktor Determinan terhadap Motivasi Belajar Siswa" *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 3 no. 1, (2018) : 63-70 <http://ejournal.sitta.ac.id/index.php/attahsin/index>.
- Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* Jakarata: Perdana Media Group, 2018.
- Maunah, Binti. *Landasan pendidikan* Yogyakarta: TERAS, 2009 .
- Mortimer, Sharon T., and David Mortimer, *Quality and Risk Management in the IVF Laboratory* Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Rivai, *Kepemimpinan Pendidikan*. jakarta: Cahaya Ilmu, 2003.
- Robbins, Stephen P. *Esentials of Organizational Behavior* Prentice-Hall, 1983.
- Sani, Ridwan Abdullah, Isda Pramuniati, dan Anies Mucktiany, *Penjamin Mutu Sekolah* Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015.
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wati, Bunga. Kebijakan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Wusto (MSW) Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu," *Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan* 3, no 1, (2018): 10, <http://dx.doi.org/10.29300/nz.v3ti1.1856>.
- Zaini, Ahmad Affan. *Urgensi Manajemen Pendidikan Islam* Bandung : Ummul Quro' 2016.